PENDAHULUAN

Sejarah singkat Millennium Development Goals (MDG)
KTT Milenium. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh kepala pemerintahan sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Milenium. Deklarasi ini menghimpun komitmen para pemimpin dunia yang tidak pernah ada sebelumnya untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi dan kebebasan fundamental dalam satu paket. Dalam konteks inilah, negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*). Setiap tujuan memiliki satu atau beberapa target beserta indikatornya. MDG menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama pembangunan, memiliki tenggat waktu dan kemajuan yang terukur. MDG didasarkan pada konsensus dan kemitraan global, sambil menekankan tanggung jawab negara berkembang untuk melaksanakan pekerjaan rumah mereka, sedangkan negara maju berkewajiban mendukung upaya tersebut.

Laporan MDG yang pertama telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia tahun 2004. Laporan ini memberikan gambaran pencapaian pembangunan manusia yang berhubungan dengan tujuan pertama hingga ketujuh, mengukur dan menelaah kemajuan, mengenali tantangan, dan mengkaji program dan kebijakan untuk mencapai MDG. Laporan ini memanfaatkan sumber-sumber data yang ada dan mengambil data tahun 1990 atau yang terdekat, sesuai dengan ketersediaan data, sebagai acuan dasar (*baseline*). Tujuan utama Laporan MDG ini adalah untuk mendapatkan kesamaan pandang tentang posisi Indonesia dalam kaitan dengan sasaran MDG, dan menetapkan sasaran yang harus dicapai kedepan.

Indonesia: Konteks Pembangunan

Pembangunan ekonomi yang telah ditempuh di masa lalu telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun juga mengandung berbagai permasalahan yang mendesak untuk dipecahkan. Pembangunan masa lalu yang lebih menekankan kepada tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, telah menciptakan peningkatan pendapatan perkapita, penurunan jumlah kemiskinan dan pengangguran, dan perbaikan kualitas hidup manusia secara rata-rata. Meskipun demikian, pembangunan ekonomi yang sangat berorientasi kepada peningkatan produksi nasional, tidak disertai oleh pembangunan dan penguatan berbagai institusi baik publik maupun keuangan, yang seharusnya berfungsi melakukan alokasi sumber daya secara efisien dan efektif. Bahkan proses pembangunan ekonomi yang ditopang oleh sistem represi dan ketertutupan telah melumpuhkan berbagai institusi strategis seperti sistem hukum dan peradilan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, sistem politik untuk terciptanya mekanisme kontrol dan keseimbangan (*checks and balances*), dan sistem sosial yang diperlukan untuk memelihara kehidupan yang harmonis dan damai. Hasil pembangunan yang dicapai disertai dampak negatif dalam bentuk kesenjangan antar golongan pendapatan, antar wilayah, dan antar kelompok masyarakat. Sementara itu, erosi dan kelumpuhan berbagai sistem dan lembaga strategis di atas telah menghasilkan kondisi yang rapuh serta sangat rawan terhadap guncangan, baik dari dalam negeri maupun dari dunia internasional akibat pesatnya arus globalisasi.

Krisis ekonomi tahun 1997/98 telah memberikan pelajaran yang sangat mahal namun berharga bagi bangsa Indonesia. Krisis telah memaksa Indonesia melakukan perubahan yang perlu dilakukan dalam rangka koreksi kelemahan dan kesalahan masa lalu. Ekonomi, politik,

sosial dan hukum mengalami transformasi dan reformasi menuju kepada suatu sistem baru yang diharapkan akan lebih berkeadilan, handal, dan berkelanjutan.

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Indonesia ke depan adalah sebagai berikut: (i) masih rendahnya pertumbuhan ekonomi, (ii) kualitas sumber daya manusia Indonesia masih rendah, (iii) masih kurang menyatunya kegiatan perlindungan lingkungan hidup dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sehingga sering melahirkan konflik kepentingan antara ekonomi sumber daya alam (pertambangan, kehutanan) dengan lingkungan, (iv) kesenjangan pembangunan antar daerah masih lebar, seperti antara Jawa – luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) – Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta antara kota – desa, (v) kualitas dan pelayanan infrastruktur yang belum sepenuhnya pulih dan masih tertundanya pembangunan infrastruktur baru, dan (vi) masih adanya potensi aksi separatisme dan konflik horizontal.

Dalam rangka menjawab semua tantangan dalam pembangunan Indonesia 2004-2009, Pemerintah Indonesia telah menetapkan tiga agenda pembangunan jangka menengah yaitu: (i) menciptakan Indonesia yang aman dan damai, (ii) menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis, serta (iii) meningkatkan kesejahteraan rakyat. Khusus terkait agenda yang ketiga, prioritas pembangunan dan arah kebijakannya adalah sebagai berikut: penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, peningkatan investasi, revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan, pembangunan perdesaan dan pengurangan ketimpangan antar wilayah, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, pembangunan kependudukan yang berkualitas, dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Kependudukan dan MDG

Tujuan dan sasaran MDG tidak akan tercapai, apabila masalah kependudukan, termasuk akses universal pelayanan kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana, serta perlindungan bagi hak-hak reproduksi, tidak ditangani dengan baik.

Penduduk Indonesia telah meningkat dari 119 juta pada tahun 1971 menjadi 179 juta pada tahun 1990, dan diperkirakan menjadi 219 juta pada tahun 2005. Laju pertumbuhan penduduk menunjukan kecenderungan menurun dari 2,32 persen per tahun pada kurun waktu 1971-1980 menjadi 1,97 persen per tahun pada kurun waktu 1980-1990, dan menjadi 1,48 persen per tahun pada kurun waktu 1990-2000.

Penurunan laju pertumbuhan penduduk tidak terlepas dari keberhasilan Indonesia menurunkan tingkat kelahiran (*Total Fertility Rate/TFR*) dari 5,6 anak per keluarga pada tahun 1971 menjadi 2,6 anak per keluarga pada tahun 2003. Penurunan tingkat kelahiran erat kaitannya dengan meningkatnya pemakaian kontrasepsi. Pada tahun 1980 tingkat pemakaian kontrasepsi hanya 26 persen, meningkat menjadi 60,3 persen pada tahun 2002. Namun demikian, setiap tahun (sampai dengan tahun 2015) diperkirakan masih akan terjadi kelahiran sekitar 4 juta jiwa, dan pertambahan penduduk baru sekitar 2,4-2,7 juta jiwa.

Komitmen Pemerintah untuk mencapai target MDG

Walaupun masih banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah bertekad untuk memenuhi komitmen pencapaian target MDG pada 2015, bahkan target pembangunan jangka menengah dalam RPJMN untuk penanggulangan kemiskinan lebih cepat dari target MDG. MDG telah menjadi salah satu bahan masukan penting dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Nasional. Dialog-dialog dengan semua pihak akan terus diupayakan untuk mencari kesepahaman dan langkah kerjasama konkrit di masa yang akan datang. Hal ini penting untuk dilakukan karena pencapaian MDG akan lebih mudah dicapai dengan dukungan partisipasi aktif dari swasta dan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan bahwa sumber pendanaan dalam negeri pemerintah masih belum sepenuhnya mencukupi untuk membiayai pembangunan, karena itu Pemerintah masih memerlukan dukungan internasional bagi pelaksanaan pembangunan. Dalam kaitan itu, Pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan kerjasama pembangunan melalui penyusunan strategi pengelolaan utang luar negeri, penguatan koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta peningkatan harmonisasi pelaksanaan kerjasama internasional secara keseluruhan.

Pemerintah Indonesia juga akan terus mendukung upaya mempererat pelaksanaan kerjasama regional Asia Pasifik. Kerjasama ekonomi dan perdagangan antar negara di Asia Pasifik mempunyai potensi yang besar untuk terus dikembangkan, untuk meningkatkan kemampuan masing-masing negara dalam rangka mencapai MDG di kawasan, serta meningkatkan posisi tawar bersama di lingkungan global.